

PENINGKATAN KAPASITAS *LEGAL DRAFTING* PEMERINTAHAN MELALUI PENYUSUNAN PERATURAN NAGARI DI SUMANIAK KECAMATAN SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR

**Ade Suzana Eka Putri^{1*)}, Hengki Andora²⁾, Jendrius³⁾, Masrizal¹⁾, dan
Soraya Permata Sujana¹⁾**

¹⁾ Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas

²⁾ Fakultas Hukum Universitas Andalas

³⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

^{*)} Email Koresponden: adesuzana@ph.unand.ac.id

ABSTRAK

Nagari Sumaniak memiliki begitu banyak potensi diberbagai aspek yang dapat dikembangkan. Potensi tersebut sudah dimanfaatkan dengan baik, namun masih terdapat beberapa potensi yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Pada aspek pemerintahan, diidentifikasi bahwa Pemerintah Nagari Sumaniak mengalami kesulitan dalam menyusun Peraturan Nagari disebabkan karena minimnya informasi yang didapat oleh perangkat nagari terkait penyusunan Peraturan Nagari. Sementara itu, kesiapan sumber daya manusia diperlukan sebagai pelaku eksekutif di daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Untuk itu perlu adanya peningkatan kapasitas perangkat nagari dalam menyusun peraturan nagari melalui pelatihan *legal drafting* bagi pemerintah nagari. Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pemerintah nagari dalam menyusun peraturan di nagari. Kegiatan dilakukan di Nagari Sumaniak. Sasaran kegiatan adalah Perangkat Nagari Sumaniak. Metode yang digunakan kegiatan ini adalah metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*) guna menyusun CAP (*Community Action Plan*). Kegiatan dilakukan melalui berbagai tahapan seperti FGD/ brainstorming bersama perangkat nagari, revisi dan drafting peraturan nagari, serta pelatihan terkait *legal drafting* bagi perangkat nagari. Dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan, maka terlihat adanya motivasi seluruh perangkat nagari untuk melakukan kontribusi nyata dalam memberikan ide, gagasan, serta dukungan dalam penyusunan peraturan nagari. Kemudian, adanya peningkatan kapasitas perangkat nagari dalam menyusun peraturan nagari setelah dilakukannya pelatihan. Seluruh sumber daya berkomitmen untuk dapat membantu dalam pembangunan di nagari. Disarankan kepada pemerintah nagari agar selalu melakukan pembinaan secara berkala serta meningkatkan kualitas dan kapasitasnya dalam melakukan profesionalisme kerja. Kemudian, diharapkan kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat khususnya perangkat nagari dalam membuat peraturan nagari.

Kata Kunci: *peningkatan kapasitas, pemerintahan nagari, pelatihan, legal drafting, sumaniak*

Increasing The Government'S Legal Drafting Capacity through The Development of Nagari Regulations in Sumaniak, Salimpaung District, Tanah Datar Regency

ABSTRACT

Nagari Sumaniak has so much potential in various aspects that it can be developed. This potential has been utilized well, but there is still some potential that has not been fully utilized. In the aspect of governance, it was identified that the Sumaniak government had difficulties in drafting nagari regulations due to the lack of information obtained by the nagari governments related to the preparation of nagari regulations. Meanwhile, the readiness of human resources (governments) is needed as actors in the regions in carrying out government affairs. For this reason, it is necessary to increase the capacity of the nagari governments in drafting nagari regulations through legal drafting training for the nagari governments. The aim of this activity is to increase the understanding and ability of the nagari governments through drafting regulations in the nagari. The activity was carried out in 2020-2021 at Nagari Sumaniak. The target of this activity is the entire Nagari government in Sumaniak. The method

used in this activity is the PRA (*Participatory Rural Appraisal*) method to prepare a CAP (*Community Action Plan*). Activities are carried out through various stages, such as FGD / brainstorming with nagari governments, revision and drafting of nagari regulations, as well as training related to legal drafting for nagari governments. From the various activities that have been carried out, it can be seen that there is motivation throughout the nagari governments to make a real contribution in providing ideas and support in the preparation of the nagari. Then, increase the capacity of the nagari governments in preparing the nagari after the training. All resources are committed to being able to assist in the development of the nagari. It is recommended for the nagari government to always carry out regular training and improve its quality and capacity in carrying out work professionally. Then, it is hoped that the local governments can provide further understanding to the community, especially regarding the nagari governments in making a nagari regulations.

Keywords: *capacity building, nagari governance, training, legal drafting, sumaniak*

PENDAHULUAN

Indeks Desa Membangun (Indeks Pembangunan Nagari) merupakan suatu program yang disusun untuk mendukung upaya pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri di Indonesia. Tujuan disusunnya indeks desa membangun adalah untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian suatu desa serta menyediakan data dan informasi yang mendasar bagi pembangunan sebuah desa.⁽¹⁾

Nagari Sumaniak merupakan sebuah nagari yang terletak di Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini memiliki luas wilayah sekitar 2000,7 Ha dan berbatasan langsung dengan Nagari Kumango dibagian barat, Nagari Sungayang di bagian timur, Nagari Sungai Tarab di bagian selatan, serta Nagari Situmbuk dan Nagari Sungai Patai di bagian utara. Nagari Sumaniak terdiri dari 7 (tujuh) jorong yang tersebar di sekitar nagari, yaitu jorong Koto piliang, Piliang Sani, Piliang Laweh, Mandahiliang, Guguk Panjang, Guguk Manih, dan Guguk Tinggi. Masing-masing jorong ini dikepalai oleh wali jorong dan untuk pemerintahan nagari secara keseluruhan dikepalai oleh wali nagari.⁽²⁾

Sebagian besar penduduk di Nagari Sumaniak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, dan pedagang, sebab daerah yang dapat dijadikan sebagai lahan untuk kegiatan tersebut sangatlah luas. Kemudian juga banyak dari penduduk nagari yang bekerja di sektor pemerintah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Besarnya potensi yang dimiliki oleh nagari sumaniak, baik itu dalam bidang pertanian, peternakan, UMKM, wisata, serta adanya potensi dari segi SDM nya sendiri, menjadikan potensi-potensi ini perlu untuk dikembangkan. Beberapa potensi yang dimiliki oleh nagari ini sudah ada yang dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat dan pemerintah dengan baik, namun masih terdapat beberapa potensi yang masih belum dimanfaatkan dengan maksimal (Pemerintah Nagari Sumaniak, 2020).

Nagari Sumaniak merupakan mitra binaan Universitas Andalas. Sebagai perguruan tinggi yang melakukan tridharma perguruan tinggi, maka Universitas Andalas memiliki tanggung jawab dalam memberikan kontribusi untuk membantu masyarakat dan pemerintah nagari dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang tengah dihadapi oleh nagari, serta membantu memanfaatkan dan mengembangkan segala potensi yang ada di nagari. Sebagai institusi perguruan tinggi di Sumatera Barat,

Universitas Andalas dapat melakukan kegiatan ini sebagai wujud pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Kegiatan ini dicanangkan harus dapat membantu nagari dan masyarakat nagari untuk dapat mampu mempersiapkan diri menjadi nagari yang tangguh dalam menghadapi berbagai permasalahan (Ase, et al 2021).

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun dan berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Nagari Sumaniak memiliki status sebagai desa / nagari berkembang (Kementerian Desa PDT, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2016); (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Pemerintah nagari selama ini masih terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan di nagari mencapai status sebagai desa maju. Untuk meningkatkan statusnya menjadi desa / nagari maju, maka perlu dilakukannya pembangunan yang partisipatif. Pembangunan partisipatif memprioritaskan pembangunan kapasitas warga yang kritis dan dinamis, sehingga terbentuk masyarakat yang andil di setiap tahapan pembangunan di nagari. Kemudian, perlu adanya penguatan kapasitas pemerintahan, sehingga lebih responsif dalam melakukan pembangunan di nagari. Terakhir, perlu adanya arahan atau pendampingan dalam membantu pengimplementasian setiap program pembangunan tersebut. Artinya, pembangunan partisipatif ini nantinya dilakukan sebagai pendekatan dalam melakukan sebuah perencanaan di daerah dengan mewajibkan keterlibatan semua komponen masyarakatnya (Bihamding, 2019).

Sebagai mitra bagi Nagari Sumaniak, maka Universitas Andalas juga turut berkontribusi dalam membantu melakukan pembangunan yang partisipatif di nagari. Pada akhir tahun 2020, Universitas Andalas Padang telah melakukan kunjungan ke Nagari Sumaniak dalam rangka melakukan analisis situasi dan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi oleh nagari. Melalui pertemuan dengan wali nagari dan perangkat nagari yang ada, Tim dari Universitas Andalas menemukan beberapa hal yang masih perlu dikelola kembali dengan baik oleh nagari atau bahkan nagari perlu melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka terwujudnya ketangguhan nagari dan meningkatnya kapasitas masyarakat nagari dan pemerintah nagari. Beberapa permasalahan yang tengah dihadapi oleh nagari mencakup ke dalam 3 (tiga) permasalahan besar, yaitu masalah pada sektor pemerintah, ekonomi, dan kesehatan (Pemerintah Nagari Sumaniak, 2020).

Berfokus pada masalah di bidang pemerintahan, maka tim dari Universitas Andalas telah mengidentifikasi bahwa resistensi pemerintahan nagari cukup lemah. Selama ini ternyata pemerintah nagari mengalami kesulitan dalam melakukan penyusunan terhadap peraturan nagari (pernag). Perancangan peraturan nagari selama ini bersifat umum dan hanya berpedoman kepada peraturan yang ada serta mencontoh beberapa peraturan dari nagari lainnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang diterima oleh SDM di nagari dalam membuat dan menyusun peraturan nagari (Pemerintah Nagari Sumaniak, 2020). Padahal, dalam melaksanakan otonomi daerah, perlu adanya kesiapan sumber daya manusia (pemerintah) sebagai pelaku eksekutif di daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya (Saldi, 2001); (Pemerintah Republik Indonesia, 2004). Kelemahan ini disadari oleh pemerintah nagari, sehingga berangkat dari permasalahan tersebut, nagari menginginkan adanya kerjasama dengan Tim Universitas Andalas dalam membantu pemerintah nagari untuk meningkatkan kapasitas pemerintah nagari dalam membuat perancangan dan menyusun peraturan

nagari. (Pemerintah Nagari Sumaniak, 2020).

Berdasarkan permasalahan diatas, maka Universitas Andalas melakukan kegiatan penguatan dan peningkatan kapasitas pemerintah / perangkat nagari dalam menyusun peraturan nagari melalui pelatihan penyusunan peraturan nagari dengan sistem *legal drafting*.

Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pemerintah nagari dalam menyusun peraturan nagari.

METODOLOGI

Kegiatan ini dilakukan di Nagari Sumaniak, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Sasaran dalam kegiatan ini adalah perangkat pemerintah nagari, seperti wali nagari dan jajarannya, BPRN (Badan Perwakilan Rakyat Nagari), Dewan KAN (Kerapatan Adat Nagari), serta tokoh agama dan tokoh masyarakat di nagari. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*), yang mana pada metode ini tim universitas menjadi fasilitator sehingga dapat memfasilitasi pemerintah nagari dan masyarakat lainnya dalam mengenal dan memanfaatkan metode partisipatif untuk menyusun CAP (*Community Action Plan*).

Kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah nagari dalam menyusun peraturan nagari dengan sistem *legal drafting* ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari tahap awal hingga tahap pelaksanaan kegiatan. Berikut adalah detail metode di setiap tahapan : (1) Pengenalan dengan pemerintah dan masyarakat dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi kegiatan. Analisis situasi dilakukan dengan analisis data sekunder yang bertujuan untuk memetakan kondisi dan potensi yang ada di nagari. Data sekunder diperoleh dari Profil Nagari Sumaniak yang ada. Identifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat nagari dilakukan melalui metode FGD dan *brainstorming*. (2) Pada tahap pelaksanaan kegiatan, dilakukan kegiatan yang dapat membantu nagari dalam memperkuat dan meningkatkan kapasitas perangkat nagari dalam menyusun peraturan di nagari. Pada tahap ini, dilakukan proses revisi dan penyusunan draft peraturan nagari yang telah ada. Kegiatan ini dibantu oleh mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. Kemudian, juga dilakukan pelatihan penguatan kapasitas perangkat nagari dalam menyusun peraturan nagari melalui pelatihan *legal drafting* kepada semua perangkat nagari dengan mendatangkan narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Andalas..

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Focus Group Discussion (FGD)

Telah dilakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) di ruang pertemuan nagari Sumaniak yang dihadiri oleh semua perangkat nagari. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud mengidentifikasi permasalahan dan menggali potensi pemerintah untuk memecahkan masalah tersebut. Dari hasil FGD dan juga *brainstorming* yang telah dilakukan oleh Tim Universitas Andalas bersama dengan seluruh Perangkat Nagari

Sumaniak, maka ditemukan bahwa nagari mengalami kesulitan dalam melakukan penyusunan peraturan nagari. Selama ini, dalam membuat peraturan nagari, hanya berdasarkan peraturan yang ada sebelumnya. Dari hasil FGD ini dapat dilihat bahwasanya seluruh perangkat nagari memerlukan adanya pelatihan atau bimbingan terkait penyusunan peraturan nagari. Kemudian, hal ini juga didukung oleh wali nagari agar semua perangkat nagari mendapatkan bimbingan untuk menyusun dan merancang peraturan nagari dengan benar.



Gambar 1. FGD Bersama Perangkat Nagari Sumaniak

Kegiatan awal yang dilakukan tim, hal ini sejalan dengan hasil kegiatan awal yang juga dilakukan oleh Zayadi dkk (2009) pada kegiatan di Nagari Beringin, Tanah Datar. Pada kegiatan tersebut, kegiatan diskusi awal juga dilakukan oleh tim dan mitra nagari secara informal, guna mempererat hubungan tim dan mitra nagari (perangkat nagari). Dengan adanya diskusi informal tersebut, dapat membantu dan memudahkan tim dalam melakukan analisis dan identifikasi masalah, serta menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan berikutnya (Zainuddin et al., 2009).

2. Kontribusi dan Keterlibatan Mahasiswa Unand

Dalam melakukan penyusunan terhadap peraturan nagari, mahasiswa Universitas Andalas dari Fakultas Hukum dilibatkan dalam membantu nagari menyusun draft Peraturan Nagari. Mahasiswa Unand turut membantu nagari dalam memperbaiki narasi Peraturan Nagari yang sudah ada, membantu proses drafting peraturan baru, kemudian juga ikut serta dalam mempersiapkan pembuatan naskah akademik peraturan. Dalam membantu kegiatan penyusunan peraturan nagari ini, maka mahasiswa Unand telah melakukannya secara berkelanjutan selama masa pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam membantu nagari dalam menyusun peraturan nagari ini adalah seperti: membantu dalam pemilihan diksi peraturan, membantu membuat draft peraturan terkait Pasar Tradisional, Air Bersih dan Aset, membantu

memeriksa kembali dasar hukum yang ada dalam peraturan, serta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua pasal-pasal pada BAB dalam peraturan nagari yang dibuat.

Setelah dilakukannya beberapa kali pertemuan dan diskusi dengan wali nagari terhadap penyusunan peraturan nagari oleh mahasiswa Unand, maka setelah itu hasil dari penyusunan dan revisi peraturan nagari tersebut diserahkan kembali kepada nagari untuk dapat menjadi pedoman bagi nagari dalam membuat peraturan lainnya. Peraturan yang telah dibuat tersebut juga sudah diajukan ke BPRN yang ada di nagari dan kemudian telah disahkan menjadi Peraturan Nagari. Output yang dihasilkan ini sudah sangat baik dilakukan oleh mahasiswa Universitas Andalas di Nagari Sumaniak pada tahun 2021.



Gambar 2. Proses Revisi Peraturan Nagari Oleh Mahasiswa Universitas Andalas

Kegiatan yang dilakukan oleh tim dan mahasiswa Universitas Andalas pada kegiatan ini, juga sama dilakukan oleh mahasiswa Universitas Diponegoro di Desa Jepara pada tahun 2021. Mahasiswa tersebut juga membantu pembuatan draft peraturan desa tentang pengelolaan aset desa. Kegiatan yang sama dilakukan dengan berdiskusi bersama Kepala Desa untuk membahas isi peraturan desa tentang Pengelolaan Aset Desa. Dengan adanya kegiatan yang dibantu oleh mahasiswa tersebut, dapat membantu desa dalam melakukan percepatan pembangunan desa (Hafiz, 2021).

3. Pelatihan Penguatan Kapasitas Perangkat Nagari

Pada 7 Desember 2021, dilakukan kegiatan Pelatihan Penguatan Kapasitas Perangkat Nagari dalam Membuat dan Menyusun Peraturan Nagari. Pelatihan ini ditujukan kepada perangkat nagari dan dihadiri oleh semua perangkat nagari seperti : wali nagari dan jajarannya, BPRN, KAN, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang juga akan terlibat dalam penyusunan peraturan di nagari. Narasumber dari kegiatan pelatihan ini adalah bapak Dr. Hengki Andora, SH.,LLM. Dari Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Dalam pelatihan penguatan kapasitas perangkat nagari dalam menyusun peraturan nagari melalui *legal drafting* ini, telah dilakukan *transfer of knowledge* kepada perangkat nagari terkait dasar hukum yang harus diketahui sebelum membuat peraturan nagari, hierarki peraturan, kewenangan-kewenangan perangkat nagari dalam menyusun peraturan, serta tahapan dalam menyusun peraturan nagari mulai dari tahap

perencanaan peraturan, penyusunan peraturan, pembahasan peraturan, penetapan peraturan, perundangan peraturan, hingga penyebarluasan peraturan yang sudah dibuat. Kemudian, dalam pelatihan peningkatan kapasitas perangkat nagari untuk menyusun peraturan nagari ini, juga diberikan pemahaman terkait *legal drafting*, yaitu penyusunan peraturan nagari, seperti sistematika penulisan peraturan serta komponen yang perlu dituliskan dalam membuat Peraturan Nagari.



Gambar 3. Pelatihan Penguatan Kapasitas Perangkat Nagari Dalam Membuat Peraturan Nagari

Output dari diadakannya kegiatan pelatihan penguatan kapasitas perangkat nagari ini adalah sebagai berikut :

1. Perangkat nagari sudah memahami hierarki sebuah aturan dari yang tertinggi hingga yang terendah di pusat hingga daerah
2. Perangkat nagari sudah lebih memahami wewenang setiap perangkat nagari dalam menyusun peraturan nagari
3. Perangkat nagari sudah memahami proses dan tata cara penyusunan peraturan nagari yang benar
4. bahwa nagari sudah dapat lebih memahami proses dan tata cara penyusunan peraturan nagari yang benar

Dari hasil pelaksanaan Pelatihan Penguatan Kapasitas Perangkat Nagari ini, maka terlihat adanya motivasi seluruh perangkat nagari untuk melakukan kontribusi nyata dalam memberikan ide, gagasan, serta dukungan dalam penyusunan peraturan

nagari. Kapasitas perangkat nagari sudah meningkat dan pemerintah nagari juga telah mampu memahami tata cara penyusunan peraturan nagari yang benar. Seluruh sumber daya juga berkomitmen untuk dapat membantu dalam pembangunan di nagari.

Hasil dari kegiatan ini sejalan dan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh Zayadi dkk (2009) pada kegiatan di Nagari Beringin, Tanah Datar. Pada kegiatan tersebut, juga dilakukan lokakarya dan pelatihan (lokalatih) dengan melibatkan perangkat nagari untuk meningkatkan kemampuan pemerintah nagari dalam menyusun peraturan nagari. Dari kegiatan ini juga dihasilkan adanya peningkatan kapasitas perangkat nagari dalam menyusun peraturan nagari, adanya motivasi bersama dalam membangun nagari, serta mulai dipaktekannya perancangan beberapa produk hukum di nagari (peraturan nagari).

Kemudian, pelatihan penyusunan peraturan nagari yang pernah dilakukan oleh Syofiarti (2018) di Nagari Sungai Buluh Timur, Batang Anai, juga mendapatkan respon yang positif dan hasil yang baik dalam meningkatkan kapasitas perangkat nagari dan pnatiaan di lingkungan nagari. Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan yang dilakukan oleh Siregar dkk (2020) di Kecamatan Bayang, Pesisir Selatan juga menyatakan bahwa kegiatan pelatihan penyusunan produk hukum oleh pemerintah nagari dapat memotivasi perangkat nagari dalam menyusun produk hukum nagari itu sendiri. Antusias perangkat nagari dalam pelatihan mengindikasikan bahwa adanya peningkatan pemahaman perangkat nagari dalam menyusun peraturan nagari, melalui pengalaman, pelatihan, dan praktik yang telah dilakukan.⁽¹²⁾

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari kegiatan ini adalah: 1. Telah dilaksanakan kegiatan pelatihan penyusunan peraturan nagari melalui sistem legal drafting untuk peningkatan dan penguatan kapasitas pemerintahan di Nagari Sumaniak, Kabupaten Tanah Datar, 2. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, terlihat adanya motivasi seluruh perangkat nagari untuk melakukan kontribusi nyata dalam memberikan ide, gagasan, serta dukungan dalam penyusunan peraturan nagari, 3. Kapasitas perangkat nagari sudah meningkat dan pemerintah nagari juga telah mampu memahami tata cara penyusunan peraturan nagari dengan benar, dan 4. Seluruh sumber daya (perangkat nagari) berkomitmen untuk dapat membantu dalam pembangunan di nagari.

Disarankan kepada pemerintah nagari agar selalu melakukan pembinaan secara berkala serta meningkatkan kualitas dan kapasitasnya dalam melakukan profesionalisme kerja. Kemudian, diharapkan kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan pemahaman lebih lanjut kepada masyarakat khususnya perangkat nagari dalam membuat peraturan nagari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ase, P., Jendrius J, Masrizal M, Sari J. 2021. Sosialisasi rancangan pembangunan Nagari Sumaniak Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar yang responsif terhadap dampak pandemi covid-19. *Buletin Ilmiah Nagari Membangun*; 4(1):20-7.
- Bihamding H. 2019. Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa. Deepublish
- Hafiz, M.A. 2021. Guna Percepat Strategi Pembangunan Desa, Mahasiswa Kkn Undip Bantu Pembuatan Draft Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Aset Desa. Jepara;
- Kementerian Desa PDT, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2016. Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun. Kementerian Desa PDT, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.
- Pemerintah Nagari Sumaniak. 2020. Profil Nagari Sumaniak, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Tahun 2020. Pemerintah Nagari Sumaniak
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta
- Pemerintah Nagari Sumaniak. 2020. Permasalahan Di Nagari Sumaniak. In: Universitas Andalas, Editor. Pengabdian Kepada Masyarakat Membantu Nagari Membangun.
- Saldi I. 2001. Otonomi Daerah Setelah Berlakunya Uu No 22 Tahun 1999. Padang: Universitas Andalas
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Uu No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Republik Indonesia
- Syofiarti S. 2018. Pelatihan penyusunan peraturan nagari di Nagari Sungai Buluh Timur Kecamatan Batang Anai. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*. 25(1):55-61.
- Siregar Ss, Rosadi O, Roza D. 2020. Penyusunan produk hukum sebagai kewenangan pemerintahan nagari di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. *Buletin Ilmiah Nagari Membangun*, 3(2).
- Zainuddin, Z., H.M. Siregar, D. Puspita. 2009. Peningkatan kemampuan pemerintahan nagari dalam menyusun peraturan nagari (legal drafting) di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang*.